AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i3.11804

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN PENERAPAN SISKEUDES DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA DESA ANTI KORUPSI DI DESA KUBANG TANGAH

Analysis of Success Factors in the Implementation of SISKEUDES to Support the Realization of Desa Anti Korupsi in Desa Kubang Tangah

Suvenratno & Putri Febri Wialdi
Universitas Negeri Padang
suvendratno9@gmail.com; putrifwialdi@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 3, 2026	Jul 31, 2026	Aug 12, 2026	Aug 17, 2026

Abstract

Transparent, accountable, and effective village financial management is an important aspect of achieving good village governance and preventing corrupt practices. This study aimed to analyze the implementation of the *Sistem Keuangan Desa* (SISKEUDES) in supporting the realization of *Desa Antikorupsi* and to identify the factors determining its successful implementation in Kubang Tangah Village, Sawahlunto City. The study employed a qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation, while informants were selected purposively based on their involvement in and knowledge of village financial management and SISKEUDES implementation. The data were analyzed using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data credibility was assessed through source triangulation. The analysis was based on John F. Rockart's Critical Success Factors (CSF) perspective, operationalized into six dimensions: leadership support, human resource competence, technological infrastructure, regulations and procedures, coordination and assistance, and community participation. The

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

results showed that SISKEUDES had been successfully implemented in Kubang Tangah Village and supported the processes of village financial planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Implementing the system contributed to more orderly, transparent, and accountable financial management, thereby supporting corruption prevention efforts. Its successful implementation was determined by leadership commitment, officials' competence strengthened through training and experience, generally adequate technological infrastructure, compliance with regulations and procedures, continuous coordination and assistance, and community participation through village deliberations, information disclosure, and oversight. Although internet network and server disruptions still occurred, these constraints were temporary and manageable. These findings confirm that the success of SISKEUDES is determined not only by the application's technical capabilities but also by the synergy among organizational, human resource, technological, regulatory, assistance, and community participation factors in strengthening village financial governance and supporting the realization of *Desa Antikorupsi*.

Keywords: SISKEUDES; Critical Success Factors; *Desa Antikorupsi*; Village Financial Management; Village Governance

Abstrak: Pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efektif merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta mencegah praktik korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mendukung terwujudnya Desa Antikorupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penerapannya di Desa Kubang Tangah, Kota Sawahlunto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai pengelolaan keuangan desa dan penerapan SISKEUDES. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber. Analisis didasarkan pada perspektif *Critical Success Factors* (CSF) John F. Rockart yang dioperasionalkan ke dalam enam dimensi, yaitu dukungan pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, regulasi dan prosedur, koordinasi dan pendampingan, serta partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES di Desa Kubang Tangah telah berjalan dengan baik dan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Penerapan sistem tersebut berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mendukung upaya pencegahan korupsi. Keberhasilan penerapannya ditentukan oleh komitmen pimpinan, kompetensi aparatur yang diperkuat melalui pelatihan dan pengalaman, infrastruktur teknologi yang secara umum memadai, kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur, koordinasi dan pendampingan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, keterbukaan informasi, dan pengawasan. Meskipun gangguan jaringan internet dan server masih ditemukan, kendala tersebut bersifat sementara dan dapat dikelola. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan SISKEUDES tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis aplikasi, tetapi juga oleh sinergi faktor organisasi, sumber daya manusia, teknologi, regulasi, pendampingan, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola keuangan desa serta mendukung terwujudnya Desa Antikorupsi.

Kata Kunci: SISKEUDES; *Critical Success Factors*; Desa Antikorupsi; Pengelolaan Keuangan Desa; Tata Kelola Desa

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa (Aligarh, 2025). Digitalisasi tidak hanya menjadi sarana modernisasi administrasi, tetapi juga dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan desa (Anwar et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Ketentuan tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Setneg RI, 2014; Kemendagri RI, 2018).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan secara lebih terstruktur. Aplikasi ini mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan mendukung proses perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan desa (Bagiada & Hadi, 2023). Dalam penelitian Suvenratno, Desa Kubang Tangah telah menggunakan siskeudes sejak 2017. Sebelum penerapan sistem, pelaporan dilakukan secara manual menggunakan Excel dan dokumen kertas, yang menurut informan menimbulkan kesalahan perhitungan dan keterlambatan pelaporan. Penerapan siskeudes kemudian membuat data keuangan lebih terstruktur dan mudah ditelusuri (Marshanda et al., 2025).

Desa Kubang Tangah dipilih karena berhasil meraih penghargaan sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi pada 2024. Capaian tersebut menunjukkan adanya praktik tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat langsung dipahami sebagai akibat penggunaan aplikasi semata. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa siskeudes dapat membantu transparansi dan akuntabilitas, tetapi keberhasilan implementasinya juga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, infrastruktur, kepatuhan terhadap aturan, dan mekanisme pengawasan (Assyahri & Vaguita, 2020; Hardianto et al., 2022; Ilham & Lusiani, 2022). Studi (Rahmi et al., 2022; Rivan, 2019) juga menunjukkan bahwa siskeudes dapat mendukung pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel dalam konteks pencegahan korupsi. Studi (Fadila & Pravitasari, 2025)

memperlihatkan bahwa pencatatan digital melalui siskeudes mendukung akses informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penelitian ini menempatkan keberhasilan penerapan siskeudes dalam perspektif Critical Success Factors (CSF) yang diperkenalkan (Bullen & Rockart, 1981). Perspektif tersebut memandang bahwa keberhasilan organisasi atau suatu sistem dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci yang harus mendapat perhatian manajemen. Dalam penelitian ini konsep CSF dioperasionalkan menjadi enam dimensi yang sesuai dengan konteks pemerintahan desa, yaitu dukungan pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, regulasi dan prosedur, koordinasi dan pendampingan, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan ini memberi kebaruan karena tidak hanya melihat fungsi teknis siskeudes, tetapi juga menjelaskan keterpaduan faktor organisasi, sumber daya, regulasi, dan lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan implementasinya. Fokus penelitian diarahkan pada enam dimensi tersebut dan kontribusinya terhadap pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan siskeudes di Desa Kubang Tangah dalam mendukung terwujudnya Desa Anti Korupsi serta menganalisis faktor-faktor keberhasilan penerapannya berdasarkan perspektif Critical Success Factors.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2023), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama serta data diperoleh melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses penerapan siskeudes dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya dalam konteks pemerintahan Desa Kubang Tangah. Lokasi penelitian berada di Desa Kubang Tangah, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Desa tersebut dipilih karena telah menerapkan siskeudes dan memperoleh predikat Desa Percontohan Anti Korupsi pada tahun 2024.

Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa serta penerapan siskeudes. Informan terdiri atas Kepala Desa Kubang Tangah, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Operator siskeudes, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pendamping Desa. Kelima informan tersebut dipandang

mewakili unsur pimpinan, pelaksana administrasi dan operator sistem, pengawasan masyarakat, serta pendampingan eksternal.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan dokumentasi lapangan. Data sekunder berasal dari dokumen pemerintah desa, seperti laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban keuangan, keluaran aplikasi siskeudes, arsip kegiatan pengelolaan dana desa, peraturan perundang-undangan, serta pedoman teknis BPKP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data wawancara dan dokumentasi disaring berdasarkan tema penelitian, kemudian disajikan secara naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Operator siskeudeS, Ketua BPD, dan Pendamping Desa (Miles et al., 2022).

HASIL

Penerapan Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Data penelitian menunjukkan bahwa siskeudes telah menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan Desa Kubang Tangah. Sistem digunakan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, siskeudes digunakan untuk mendukung penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran. Pada tahap pelaksanaan, transaksi dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dicatat sesuai prosedur. Pada tahap penatausahaan, data transaksi digunakan dalam administrasi dan pembukuan. Selanjutnya, data yang tersimpan menjadi dasar penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban.

Perubahan dari pencatatan manual ke sistem berbasis aplikasi menuntut proses adaptasi aparatur desa. Adaptasi dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pengalaman penggunaan aplikasi, dan pembelajaran antarsesama perangkat desa. Seiring waktu, kemampuan aparatur berkembang sehingga siskeudes dapat digunakan pada berbagai tahapan pengelolaan keuangan. Kaur Keuangan/Operator menyatakan bahwa input APBDes dilakukan setelah dokumen disahkan dan setiap data diperiksa kembali sebelum diproses.

Laporan keuangan kemudian disusun berdasarkan transaksi yang telah tercatat dalam siskeudes.

Temuan juga menunjukkan adanya kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil dan gangguan server. Kendala tersebut dapat menyebabkan keterlambatan penginputan atau sinkronisasi, tetapi tidak menghentikan keseluruhan proses pengelolaan keuangan. Pemerintah desa mengatasinya melalui koordinasi dengan pihak terkait, menunggu sistem kembali normal, serta melakukan penyesuaian teknis. Dengan demikian, kendala tersebut muncul sebagai hambatan pelaksanaan yang masih dapat dikelola.

Tabel 1 Faktor Keberhasilan SISKEUDES

Faktor Keberhasilan Penerapan Siskeudes	Temuan Utama	Kondisi/Hambatan
Dukungan pimpinan	Kepala Desa mendorong penggunaan Siskeudes sesuai aturan dan mencari solusi atas kendala.	Tidak ditemukan hambatan utama; komitmen pimpinan konsisten.
Kompetensi SDM	Aparatur mampu menginput data, menyusun laporan, memverifikasi transaksi, dan beradaptasi dengan pembaruan sistem.	Kompetensi perlu terus diperkuat melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
Infrastruktur teknologi	Komputer dan internet secara umum memadai untuk operasional Siskeudes.	Jaringan internet dan server kadang mengalami gangguan.
Regulasi dan prosedur	Pengelolaan mengacu pada UU Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 serta tahapan pengelolaan keuangan desa.	Diperlukan evaluasi berkala mengikuti perubahan kebijakan.
Koordinasi dan pendampingan	Koordinasi internal dan pendampingan eksternal berjalan melalui konsultasi, pembinaan, dan evaluasi dokumen.	Penyesuaian dokumen dan kelengkapan berkas kadang terlambat.
Partisipasi masyarakat	Masyarakat terlibat melalui musyawarah, penyampaian aspirasi, keterbukaan informasi, dan pengawasan BPD.	Keterbukaan dan partisipasi perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

Tabel 1 merangkum temuan utama berdasarkan enam dimensi CSF. Secara faktual, keenam dimensi hadir dalam praktik pengelolaan keuangan Desa Kubang Tangah. Data menunjukkan bahwa faktor teknologi tetap memiliki hambatan, tetapi hambatan tersebut tidak menghentikan penerapan siskeudes. Sementara itu, faktor manusia, kepemimpinan, regulasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pendukung yang menjaga proses tetap berjalan.

Dukungan Pimpinan

Kepala Desa memiliki peran sentral sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala Desa mendorong seluruh perangkat menggunakan Siskeudes sesuai aturan dan mengupayakan penyelesaian bersama ketika muncul kendala. Dukungan tersebut diwujudkan melalui arahan, pengawasan, dan koordinasi dengan pendamping maupun pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes tidak berdiri sendiri, tetapi memperoleh arah organisasi dari pimpinan desa.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Perangkat Desa Kubang Tangah secara umum memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggunakan Siskeudes. Kompetensi terlihat dari kemampuan operator melakukan penginputan data, menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, mencatat transaksi, menyusun laporan realisasi APBDes dan pertanggungjawaban, serta menangani permasalahan teknis sederhana. Kompetensi berkembang melalui pelatihan, bimbingan teknis, pengalaman, dan pembelajaran antarperangkat desa.

Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi secara umum telah memadai. Pemerintah desa menyediakan komputer sebagai sarana pengelolaan keuangan dan jaringan internet untuk sinkronisasi serta pembaruan aplikasi. Kepala Desa dan Kaur Keuangan menyampaikan bahwa kendala yang muncul terutama berupa jaringan internet yang kurang stabil dan server yang kadang lambat. Kendala tersebut bersifat sementara dan tidak sering terjadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Martini, Liando, dan Palar (2019) sebagaimana dirujuk dalam skripsi, bahwa kualitas infrastruktur teknologi berkaitan dengan efektivitas penerapan Siskeudes.

Regulasi dan Prosedur

Data menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kubang Tangah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Pendamping Desa juga menyatakan bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dijalankan sesuai prosedur, meskipun evaluasi berkala tetap diperlukan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar agar penggunaan Siskeudes tidak hanya menghasilkan pencatatan digital, tetapi juga menjaga proses pengelolaan keuangan tetap berada dalam koridor hukum.

Koordinasi dan Pendampingan

Koordinasi berlangsung secara internal antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat lain pada setiap tahapan pengelolaan keuangan. Secara eksternal, pemerintah desa berkoordinasi dengan Pendamping Desa, pemerintah kecamatan, DPMD, dan BPKP ketika terdapat perubahan regulasi maupun kendala teknis. Pendampingan mencakup konsultasi, pembinaan administrasi, evaluasi dokumen, serta bantuan ketika terjadi pembaruan aplikasi atau regulasi. Koordinasi juga menjadi sarana penyelesaian masalah sehingga penyesuaian dokumen dan kendala teknis dapat dikelola.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui musyawarah desa, penyampaian aspirasi, keterbukaan informasi anggaran, dan pengawasan melalui BPD. Ketua BPD menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan melalui pembahasan APBDes, evaluasi laporan, dan pemantauan kegiatan di lapangan. Informasi keuangan disampaikan melalui musyawarah desa dan media informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan desa.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes di Desa Kubang Tangah telah berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang mengintegrasikan tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban. Penggunaan sistem membuat transaksi terdokumentasi dan lebih mudah ditelusuri. Kondisi tersebut memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena informasi keuangan tersusun secara sistematis. Temuan ini konsisten dengan (Assyahri & Vaguita, 2020) yang mengevaluasi penggunaan siskeudes dan dengan (Hardianto et al., 202); Sudaryat et al., 2025) yang membahas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui penerapan siskeudes. Dengan demikian, penerapan Siskeudes tidak hanya berperan sebagai alat bantu administratif dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian yang memperkuat keteraturan dokumentasi, kemudahan penelusuran transaksi, transparansi informasi keuangan, serta akuntabilitas aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.

Hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa teknologi bukan satu-satunya penjelasan atas keberhasilan (Wisang et al., 2023) menunjukkan bahwa siskeudes dapat membantu menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam konteks pencegahan korupsi, sedangkan penelitian (Fadila & Pravitasari, 2025) menunjukkan bahwa pencatatan digital dapat meningkatkan akses informasi dan akuntabilitas. Di Desa Kubang Tangah, manfaat tersebut diperkuat oleh kepemimpinan, kompetensi aparatur, kepatuhan regulasi, koordinasi, pendampingan, serta pengawasan masyarakat.

Dalam perspektif CSF, temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem merupakan hasil dari kombinasi faktor yang saling bergantung. Rockart (1979) menekankan pentingnya mengidentifikasi faktor yang paling menentukan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Desa Kubang Tangah, enam dimensi yang dioperasionalkan menjadi kerangka yang menjelaskan mengapa siskeudes dapat berjalan meskipun terdapat kendala teknis. Dukungan pimpinan mengarahkan penggunaan sistem, kompetensi memungkinkan sistem dioperasikan, infrastruktur menyediakan sarana, regulasi memberi batas dan prosedur, koordinasi serta pendampingan menyelesaikan persoalan, dan partisipasi masyarakat memperkuat pengawasan.

Temuan mengenai kompetensi SDM sejalan dengan (Wisang et al., 2023), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas laporan keuangan desa. Dalam konteks Kubang Tangah, kompetensi terlihat melalui kemampuan operator menginput data, memverifikasi transaksi, dan menyusun laporan. Temuan mengenai partisipasi masyarakat juga memperkuat penelitian Rahmi et al. (2022); (Subhi, 2024), yang menunjukkan pentingnya keterlibatan BPD dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

Penelitian terdahulu umumnya menyoroti efektivitas, transparansi, akuntabilitas, atau pencegahan korupsi melalui siskeudes. Penelitian ini memperluas sudut pandang tersebut dengan menempatkan faktor keberhasilan implementasi dalam satu kerangka CSF yang mencakup aspek organisasi, manusia, teknologi, regulasi, koordinasi, dan masyarakat. Dengan demikian, Desa Anti Korupsi dipahami sebagai capaian yang ditopang oleh tata kelola yang terintegrasi, bukan semata-mata oleh keberadaan aplikasi.

Implikasi secara teoretis, penelitian ini memperluas penggunaan perspektif CSF dalam konteks pemerintahan desa, khususnya untuk menjelaskan keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan. Secara praktis, temuan menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu

mempertahankan pelatihan dan bimbingan teknis, menjaga infrastruktur jaringan dan perangkat, melakukan evaluasi kepatuhan regulasi, memperkuat koordinasi dengan pendamping dan instansi terkait, serta menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus satu desa dan penggunaan pendekatan kualitatif dengan lima informan utama, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh desa.

Data penelitian juga menunjukkan adanya temuan yang berlawanan dengan pola keberhasilan umum, yaitu gangguan jaringan internet dan server serta kebutuhan evaluasi berkala terhadap kepatuhan regulasi. Temuan negatif tersebut penting karena memperlihatkan bahwa implementasi siskeudes tetap memiliki risiko teknis dan administratif. Namun, dalam konteks penelitian ini, risiko tersebut dapat dikelola melalui koordinasi, pendampingan, dan kesiapan aparatur.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kubang Tangah, Kota Sawahlunto, telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Penerapan SISKEUDES membantu aparatur desa dalam menata administrasi keuangan, mendokumentasikan setiap transaksi dan kegiatan, menyusun laporan secara lebih terstruktur, serta meningkatkan keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam perspektif Critical Success Factors (CSF) John F. Rockart, keberhasilan penerapan SISKEUDES tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi dipengaruhi oleh enam faktor utama yang saling berkaitan, yaitu dukungan pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, regulasi dan prosedur, koordinasi dan pendampingan, serta partisipasi masyarakat. Dukungan pimpinan menjadi dasar dalam memastikan komitmen terhadap penggunaan sistem dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan, sedangkan kompetensi aparatur yang diperoleh melalui pengalaman, pelatihan, dan pendampingan mendukung kemampuan dalam mengoperasikan sistem secara tepat. Infrastruktur teknologi yang secara umum memadai juga menunjang kelancaran penggunaan SISKEUDES, meskipun gangguan jaringan internet dan server masih ditemukan pada kondisi tertentu. Dari aspek regulasi dan prosedur, penerapan SISKEUDES telah diarahkan untuk mengikuti ketentuan

pengelolaan keuangan desa sehingga proses administrasi memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Koordinasi serta pendampingan turut berperan dalam menyelesaikan kendala teknis maupun administratif, sementara partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, keterbukaan informasi, dan pengawasan memperkuat aspek transparansi dan kontrol sosial. Dengan demikian, SISKEUDES di Desa Kubang Tangah dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Kendala teknis berupa gangguan jaringan dan server belum menjadi hambatan utama karena dapat diatasi melalui koordinasi, penyesuaian proses kerja, dan dukungan dari pihak terkait. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan SISKEUDES merupakan hasil dari sinergi antara teknologi, manusia, kepemimpinan, regulasi, kelembagaan, dan masyarakat dalam membangun pengelolaan keuangan desa yang berintegritas.

Kontribusi penelitian ini secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan perspektif Critical Success Factors (CSF) John F. Rockart dalam menganalisis keberhasilan implementasi sistem informasi pada konteks pengelolaan keuangan desa dengan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem dipengaruhi oleh keterkaitan enam faktor, yaitu dukungan pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, regulasi dan prosedur, koordinasi dan pendampingan, serta partisipasi masyarakat. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa SISKEUDES tidak seharusnya dipahami hanya sebagai aplikasi untuk membantu pekerjaan administratif, tetapi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dokumentasi, dan pengawasan keuangan desa. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa teknologi tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan aparatur yang kompeten, kepemimpinan yang berkomitmen, regulasi yang jelas, pendampingan yang berkelanjutan, infrastruktur yang memadai, serta keterlibatan masyarakat.

Rekomendasi penelitian selanjutnya memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan beberapa desa yang memiliki karakteristik wilayah, kapasitas aparatur, kondisi infrastruktur, dan tingkat penerapan SISKEUDES yang berbeda sehingga dapat diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor keberhasilan implementasi. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara lebih objektif kontribusi dan pengaruh masing-masing Critical Success Factors terhadap keberhasilan penerapan SISKEUDES, termasuk menguji hubungan antara kualitas sistem, kompetensi aparatur, dukungan pimpinan, kualitas infrastruktur, pendampingan, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pencegahan korupsi. Selain itu,

penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi lebih mendalam aspek keamanan data, kualitas informasi yang dihasilkan SISKEUDES, kepuasan pengguna, efektivitas pengawasan masyarakat, serta keberlanjutan penggunaan sistem dalam jangka panjang. Kajian komparatif antara desa yang telah memperoleh predikat atau program Desa Anti Korupsi dengan desa yang belum menerapkannya secara optimal juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor penghambat yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Aligarh, F., Probohudono, A. N., Widarjo, W., & Sudaryono, E. A. (2025). Village government's financial system: Investigating the impact of the technology–organization–environment (TOE) framework on performance, accountability, and transparency. *Information Development*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/02666669251352106

Anwar, K., Sulkiah, & Wadi, I. (2024). The influence of village financial system, clarity of budget targets and transparency on accountability of village fund management. *E-Jurnal Akuntansi, 34*(9), 2225–2236. https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p05

Assyahri, W., & Vaguita, M. (2020). Evaluasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2×11 Kayutanam. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18*(2), 79–91. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844

Bagiada, P. P., & Hadi, M. (2023). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi, 7*(2), 278–289. https://doi.org/10.46880/jmika.Vol7No2.pp278-289

Bullen, C. V., & Rockart, J. F. (1981). *A primer on critical success factors* (CISR Working Paper No. 69; Sloan Working Paper No. 1220-81). Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.

Fadila, A. P. N., & Pravitasari, D. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2*(3), 983–992. https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.2022

Hardianto, W. T., TM, F. F., & Rifa'i, M. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kapuas ditinjau dari evaluasi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 11*(1), 53–64. https://doi.org/10.38156/gjkmp.v11i1.85

Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif, 5*(2), 180–192. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i2.953

Marshanda, S., Liani, L. A., Melindryan, A. N., Harfianti, S. P., Andini, V. P., Suvenratno, & Syafril, R. (2025). Penguatan akuntabilitas pemerintah desa melalui digitalisasi informasi: Studi pada Desa Kubang Tangah Sawahlunto. *Edu Research, 6*(4), 1219–1227. https://doi.org/10.47827/jer.v6i4.1719

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/Permendagri-No-20-Tahun-2018

Rahmi, K. A., Azijah, D. N., & Purnamasari, H. (2022). Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Desa Karang Sentosa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 7*(1), 44–55. https://doi.org/10.25077/jakp.7.1.44-55.2022

Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 9*(2), 92–100. https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487

Subhi, M. J., Kurniawan, B., & Tanjung, F. S. (2024). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mewujudkan *good governance*: Studi kasus di Desa Teluk Tigo, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2*(1), 842–859. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i1.910

Sudaryat, Y., Djadjuli, R. D., Juliarso, A., Hidayat, E. S., & Marliani, L. (2025). Evaluasi penerapan Sistem Keuangan Desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Studi kasus di Desa Bendasari, Kecamatan Sadananya. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 11*(1), 99–107. https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4737

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D, dan penelitian pendidikan*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

Wisang, P. M. P., Mitan, W., & Jaeng, W. M. Y. (2023). Pengaruh penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan: Studi kasus pada Desa Nita dan Desa Lusitada. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 2*(4), 365–385. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1451